

**Judul** : Anggaran Ditjen Pontren Rp 4,5 T, pesantren dapat dana operasional  
**Tanggal** : Senin, 29 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Anggaran Ditjen Pontren Rp 4,5 T Pesantren Dapat Dana Operasional

KOMISI VIII DPR sepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk pembangunan dan pemberdayaan pesantren di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Dana tersebut akan dikelola Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Pontren).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar mengatakan, Ditjen Pontren dibentuk secara khusus untuk menangani pesantren di seluruh Indonesia. Prioritas utama anggaran akan diberikan kepada daerah yang memiliki banyak tempat pendidikan Islam, seperti Aceh dan Jawa Timur (Jatim).

Ansory mengungkapkan fakta dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, hanya 87 pesantren yang menerima biaya operasional. Bahkan, jumlah bantuan yang diterima masih tergolong kecil, berkisar antara Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per tahun.

"Dengan hadirnya Ditjen Pontren, seluruh pesantren bisa mendapatkan biaya operasional

yang lebih layak," harap Ansory di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ansory mengatakan, pesantren dan madrasah adalah pendidikan pertama di Indonesia dari zaman kolonial. Sehingga semua pihak harus membantu dan mendorong Pemerintah agar jangan main-main untuk membantu pesantren.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni menambahkan, penguatan sistem pengawasan di lingkungan pesantren sangat penting dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap santri. Juga untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan dan pelecehan.

"Pengawasan yang lebih efektif menjadi kebutuhan seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan," ujar Husni di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Husni, peran Kemenag perlu terus diperkuat agar mampu memastikan terciptanya lingkungan pesantren yang aman dan kondusif bagi para santri. Termasuk melakukan pengawasan yang lebih ketat

terhadap pesantren. Terlebih, para santri tinggal di lingkungan pesantren selama 24 jam sehingga diperlukan sistem pengawasan yang mampu memberikan perlindungan secara optimal.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi sebagai pendukung sistem keamanan di lingkungan pesantren. Salah satunya dengan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pelecehan. Pengawasan juga dapat membantu menekan berbagai bentuk pelanggaran lain seperti perundungan, pencurian, hingga tindakan pembinaan yang tidak sesuai aturan.

Husni mencontohkan penerapan sistem pengawasan berbasis CCTV di salah satu pesantren di Sumatera Utara (Sumut) berhasil mengurangi kasus kehilangan barang milik santri. "Juga mampu mendorong kedisiplinan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pesantren," kata politisi Gerindra ini.

Karena itu, Husni berharap Kemenag dapat mendorong pemanfaatan teknologi pengawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan santri di seluruh pesantren. Apalagi biaya pemasangan perangkat tersebut relatif terjangkau dibandingkan manfaat yang dihasilkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan, anggaran Rp 4,5 triliun tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan vital. Fokus utamanya adalah membantu kebutuhan operasional pendidikan di pesantren, madrasah, dan untuk kesejahteraan para guru.

Menurut Basnang, cakupan anggaran ini tidak hanya terbatas pada bantuan operasional, tapi juga diperuntukkan bagi pengembangan Ma'had Aly atau kampus di lingkungan pesantren, pembangunan sanitasi, hingga renovasi asrama pesantren. "Atas anggaran Rp 4,5 triliun 2027. Insyaallah 95 Ma'had Aly bisa dibangun termasuk enam di Aceh," harap Basnang. ■ TIF